

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sampah merupakan sesuatu yang tidak diinginkan atau dibutuhkan lagi sehingga dibuang begitu saja. Sampah yang berserakan baik di pinggir jalan, depan pekarang rumah dan aliran sanitasi merupakan akibat dari perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Perilaku ini bila dilakukan terus menerus akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Sampah dibuang sembarangan tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan tetapi juga akan menimbulkan masalah kesehatan, karena timbulan sampah yang menumpuk tanpa dikelola akan menimbulkan berbagai penyakit seperti tetanus, demam tifoid, dan kolera. Timbulan sampah yang menumpuk disebabkan oleh meningkatnya populasi manusia dan pola konsumsinya yang berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah sampah yang dibuang. Sampah dihasilkan oleh sumber-sumber bergerak atau beroperasi di lingkungan masyarakat meliputi pabrik, hotel, restoran, sekolah, rumah sakit dan tempat tinggal pribadi. Di setiap sumber tersebut menghasilkan beberapa jenis limbah (Parks, 2011).

Sampah memiliki beberapa golongan di antaranya sampah organik, sampah non-organik dan sampah B3. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan, sisa tulang dan sisa makanan. Sampah-sampah organik termasuk ke dalam jenis sampah yang mudah untuk terurai oleh organisme-organisme dalam tanah. Sampah non-organik merupakan sampah yang berasal dari plastik dan styrofoam. Sampah non-organik termasuk ke dalam jenis sampah yang sangat sulit terurai, dibutuhkan waktu yang lama untuk menguraikan sampah non-organik ini. Dan golongan terakhir yaitu jenis sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang mana sampah jenis ini meliputi batu baterai, pemutih pakaian, pengharum ruangan, obat nyamuk dan sebagainya yang pada intinya berbahaya dan beracun bagi manusia. Menurut *Katharine Mieszkowski* kantong-kantong belanja yang terbuat dari plastik dapat menimbulkan ancaman lingkungan yang serius dan berbahaya, apalagi jikalau sampah-sampah ini terbawa ke laut, sungai, dan ruang terbuka lainnya. Alasan

sampah plastik menjadi ancaman lingkungan karena mengandung timbal, suatu zat yang dapat mencemari lingkungan sekitar dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai (Friedman, 2009).

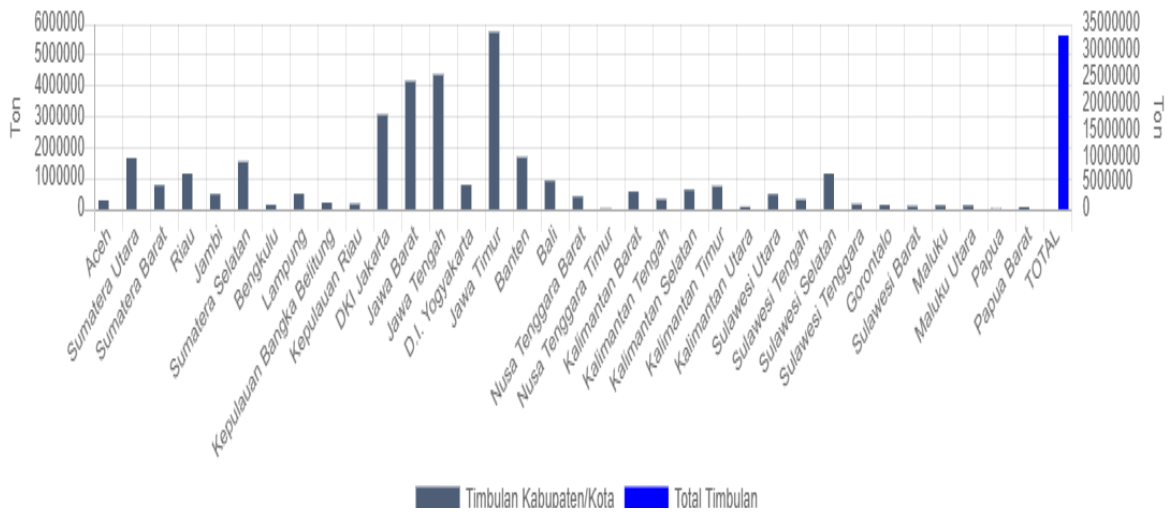
Di Indonesia, penyumbang sampah terbesar berasal dari sampah rumahan. Hal ini sejalan dengan fakta yang disebutkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 272.229.372 jiwa, dimana 137.521.557 jiwa adalah laki-laki dan 134.707.815 jiwa adalah perempuan. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menyebutkan komposisi sampah berdasarkan sumber sampah pada tahun 2019, bersumber dari rumah tangga mencapai 39.79% kemudian diikuti oleh pasar tradisional yakni 18.29%, perkantoran 4.76%, perniagaan 9.06%, kawasan 8.16%, fasilitas publik 5.82%, dan lainnya 14.12%. Persentase ini berubah di tahun 2020 di mana sampah rumah tangga sebanyak 39.78% kemudian pasar tradisional yakni 17.17%, perkantoran 3.52%, perniagaan 8.03%, kawasan 13.54%, fasilitas publik 4.79%, dan lainnya 13.17%. Perbandingan daripada persentase komposisi sampah berdasarkan sumbernya di tahun 2019 dan 2020, penyumbang sampah terbesar di Indonesia berasal dari sampah rumah tangga.

Sampah rumah tangga berasal dari sisa makanan yang telah dikonsumsi dan penggunaan plastik yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan data yang dikeluarkan oleh SIPSN bahwasannya sampah terbesar berdasarkan jenis sampahnya yakni sisa makanan sekitar 40.1% dan plastik 17.12%. Sampah yang berasal dari sisa makanan dan plastik ini tidak dapat dihindarkan bahwa keduanya digunakan setiap hari. Dengan demikian sampah menjadi isu lingkungan yang perlu dibenahi dan diselesaikan. Salah satu penanganan pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan mendaur ulang sampah-sampah tersebut seperti sisa makanan yang mana kita konsumsi setiap waktu seperti nasi, sisa lauk, sisa tulang-tulang dan sebagainya dapat didaur ulang dengan menjadikannya pupuk organik atau masyarakat mengenal dengan sebutan kompos. Kemudian sampah yang botol plastic dan kaca, styrofoam dan lainnya

dapat dijadikan dan diolah menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual yang tinggi (Parks, 2011).

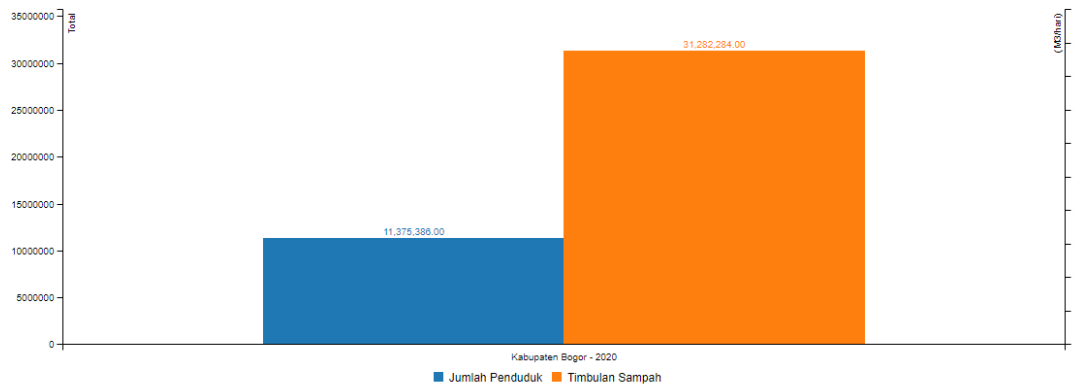
Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi timbulan sampah yang kian hari kian membengkak harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh agar timbulan sampah dapat ditanggulangi dengan bijak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ditetapkan dan diundangkan agar pengelolaan sampah mencapai titik terbaik. Namun pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi masalah, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Selain itu terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan strategi pengelolaan sampah terpilih berdasarkan urutan prioritas dengan menggunakan *Analytical Hierarchi Process* yaitu kebijakan pemerintah, lingkungan, pembiayaan, kesehatan dan persepsi masyarakat (Mahyudin, 2017, p. 67). Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), provinsi-provinsi di Indonesia yang menghasilkan sampah terbanyak ditempati oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota kabupaten yang terletak di Kecamatan Cibinong. Terdapat 40 Kecamatan dengan total Desa sebanyak 417. Pada gambar 2, menunjukkan timbulan sampah Kabupaten Bogor perhari pada tahun 2020 sebanyak 31.282.282. Banyaknya timbulan sampah yang menumpuk disebabkan oleh meningkatnya perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Bogor tiap tahunnya.

**Gambar 1 Provinsi-Provinsi dengan Timbulan sampah tertinggi**



**Gambar 2 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Perhari Kabupaten Bogor Tahun 2020**

Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per Hari



Sumber: website resmi data alam Menlhk

Desa yang terdapat di Kecamatan Ciseeng salah satunya yaitu Desa Putat Nutug di mana implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum dilakukan dengan optimal. Keberadaan peraturan daerah merupakan perwujudan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Peraturan daerah Kabupaten Bogor No 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat rencana tentang pengelolaan sampah. Rencana tersebut meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah,

pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah, dan pendanaan. Berdasarkan Perda tersebut rencana tentang pengelolaan sampah terjadi di lapangan belum terlaksana secara menyeluruh terutama di Desa Putat Nutug. Masih banyak timbulan sampah yang berada di beberapa titik di wilayah Desa memperlihatkan belum ada kesiapsiagaan dalam menangani dan mengelola masalah sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor membuat program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) yang mempunyai tiga aspek penting di antaranya (1) sanitasi, (2) penghijauan dan (3) pengelolaan sampah. Program KRL pada aspek pengelolaan sampah yang di dalamnya terdapat kegiatan pilah sampah secara mandiri yaitu setiap rumah harus memilah sampah rumah tangganya menjadi dua yaitu sampah organik dan non organik, sampah organik yang terkumpul dimasukkan ke lubang resapan biopori di mana setiap rumah dihimbau untuk membuat tiga lubang resapan biopori, sedangkan sampah non organik yang terkumpul dibawa ke Bank Sampah. Sayangnya program KRL di Desa Putat Nutug belum terlaksana secara optimal.

**Gambar 3 Wilayah Rt 02/02**



Sumber: Dokumen Pribadi (observasi awal)

**Gambar 4 Wilayah Rt 01/02**



Sumber: Dokumen Pribadi (observasi awal)

**Gambar 5 Wilayah Rt 01/06**



Sumber: Dokumen Pribadi (observasi awal)

Pengelolaan sampah tidak hanya keikutsertaan masyarakat akan tetapi diperlukannya pula kesadaran politik pemerintah dalam menindaklanjuti masalah

sampah ini. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah dapat menjadi dasar untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan serta menegakan hukum secara non-diskriminasi. Kuatnya kemauan politik menjadi aspek penentu keberhasilan pengelolaan sampah.

Penulis melakukan tinjauan penelitian-penelitian terdahulu terhadap topik terkait, untuk memperdalam wawasan mengenai implementasi kebijakan dan pengelolaan sampah serta kebijakan pemerintah dalam mengurangi dan menangani sampah. Penelitian pertama yang akan penulis bahas yaitu jurnal yang ditulis oleh Seow Ta Wee, Muhamad Azahar Abas, Goh Kai Chen, and Sulzakimin Mohamed Tahun 2017, berjudul **“The constraints of good governance practice in national solid waste management policy (NSWMP) implementation: A case study of Malaysia”**. Penelitian ini menjelaskan praktek good governance di Malaysia dalam implementasi pengelolaan sampah secara nasional. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode purposive sampling untuk memilih responden untuk wawancara mendalam. Terdapat 6 responden yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian sebagai narasumbernya yang terdiri dari 1 responden yang berasal dari Department of National Solid Waste Management (DNSWM), 4 responden yang berasal dari Solid Waste Corporation (SWCorp) dan 1 responden yang berasal dari Concession Company (Alam Flora Sdn Bhd) . Berdasarkan hasil penelitian ini guna memahami kendala dalam praktik tata kelola yang baik sangat penting untuk mengatasi masalah tata kelola yang buruk dalam implementasi kebijakan. Ada tiga kendala utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini berdasarkan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan yakni dana yang tidak memadai, kompetensi staf yang buruk, dan sistem implementasi kebijakan yang tidak jelas. Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi praktik tata kelola yang baik dalam implementasi kebijakan. Dana yang tidak memadai untuk program dan untuk implementasi rencana adalah hambatan keuangan utama dari praktik tata kelola yang baik. Oleh karena itu, keterbatasan dana menjadi kendala utama untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam implementasi NSWMP (National Solid Waste Management Policy). Masalah lain yaitu kurangnya kompetensi staf untuk menerapkan praktik tata

kelola yang baik dalam implementasi NSWMP. Kurangnya informasi, serta pengetahuan tentang NSWMP dan kurangnya keahlian merupakan tantangan yang dihadapi oleh setiap pemangku kepentingan. Namun, setiap pemangku kepentingan memiliki tantangan kompetensi staf yang berbeda berdasarkan fungsi dan ruang lingkup pekerjaannya. Oleh karena itu, setiap pemangku kepentingan harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kompetensi stafnya, agar implementasi NSWMP berjalan efektif dan tujuan dapat tercapai dengan sukses. Masalah terakhir yaitu ambiguitas sistem implementasi kebijakan merupakan tantangan lain yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mempraktekkan tata kelola yang baik dalam implementasi NSWMP. Ada beberapa faktor yang diidentifikasi berkontribusi terhadap ambiguitas implementasi NSWMP, yaitu pedoman pelaksanaan NSWMP yang tidak jelas, sistem pemantauan dan penegakan yang lemah, dan sistem koordinasi yang tidak akuntabel. Selain itu, sistem pemantauan dan penegakan NSWMP yang lemah telah menyebabkan pemangku kepentingan lain seperti pemegang konsesi dan masyarakat setempat menganggap enteng masalah ini. Inkonsistensi dalam sistem penegakan tersebut menggambarkan kelemahan dan kurangnya keseriusan terhadap kebijakan tersebut, selain itu instansi pemerintah seperti Dinas Persampahan Nasional dan Persampahan harus bekerja sama untuk mengatasi masalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Sistem pemantauan dan penegakan yang kuat akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan untuk melaksanakan tugas dan mematuhi peraturan untuk mencapai tujuan NSWMP. Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu mengangkat topik yang sama yaitu terkait pengelolaan sampah dan juga terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis mencakup wilayah Desa atau kelurahan sedangkan penelitian ini mencakup secara nasional.

Penelitian kedua ditulis oleh V de Paz, R Domingo dan F M Roxas, Tahun 2020 berjudul “**Strategy to improve the solid waste management of Barangay Matictic, Norzagaray, Bulacan**”. Limbah padat di Filipina terus menjadi masalah nasional dan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi di negara



tersebut sehingga dibutuhkan strategi untuk meningkatkan manajemen pengelolaan limbah padat di Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan penulis menggunakan metode FGD, wawancara dan observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Focus Group Discussion melibatkan perwakilan LafargeHolcim Filipina, Barangay, Norzagaray Bulacan, dan rumah tangga terpilih di Barangay. Selama Diskusi Kelompok Terfokus, Kepala Daerah Barangay menjawab pertanyaan tentang kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah di barangay dan mengetahui apakah ini konsisten dengan rencana pengelolaan lingkungan. Rumah tangga terpilih di Barangay Matictic diminta untuk menentukan jenis sampah pengelolaan sampah di masyarakat. Dari Focus Group Discussion dan wawancara penulis, ditemukan bahwa Barangay tidak memiliki anggaran untuk membangun Material Recovery Facility (MRF) mengikuti Rencana Pengelolaan Sampah Padat yang dibuat oleh Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina (DENR). Kurangnya pemilahan sampah diamati menyebabkan TPA mencapai kapasitas penuhnya. Sampah-sampah yang tidak dipilah-pilah menjadi menumpuk, dan ini sudah terlihat di sepanjang jalan Barangay. Kapasitas TPA yang berlebihan disebabkan oleh faktor-faktor seperti desain TPA yang buruk, tidak adanya perluasan dalam rencana Pengelolaan sampah padat, tidak adanya metode alternatif untuk pengolahan atau pembuangan sampah, tidak adanya rencana pemeliharaan tempat pembuangan sampah, dan terbatasnya ketersediaan tempat pembuangan sampah dan pengumpul sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di tingkat Barangay membutuhkan fokus pada pengurangan sumber sampah. Untuk itu diperlukan alokasi dana pemerintah yang memadai dan upaya perubahan perilaku membuang sampah di tingkat rumah tangga. Pendekatan perubahan perilaku ini melalui Program Insentif Eco-Saver yaitu pemisahan limbah yang tepat. Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengangkat topik yang sama, perbedaan yang ada antara penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian ini lebih berfokus pada strategi untuk meningkatkan manajemen sampah padat di Barangay sedangkan penulis berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Putat Nutug.

Penelitian ketiga yang akan penulis bahas yaitu jurnal yang ditulis oleh Priti dan Kasutri Mandal Tahun 2019 yang berjudul “**Review on evolution of municipal solid waste management in India: practices, challenges and policy implications**”. Penulis membahas masalah pengelolaan sampah kota dengan mengambil kasus India. Dengan menggunakan pendekatan evolusioner, penulis menyoroiti kesenjangan dalam perumusan kebijakan, menunjukkan tantangan yang dihadapi dan memberikan saran tentang kebijakan dan praktik pengelolaan sampah kota dengan mengadopsi kebijakan pengelolaan sampah di negara-negara lain yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah. Fakta luas lahan yang terbatas di India dan jumlah penduduk yang padat, maka dibutuhkan solusi dalam menangani permasalahan sampah kota di India maka dari itu, penulis menjelaskan bahwa dibutuhkannya sistem inovasi dalam (*municipal solid waste management*) MSWM. Landfill adalah metode utama dalam (*municipal solid waste management*) MSWM di India yang mana memanfaatkan lebih banyak sumber daya lahan untuk mengakomodasi timbulan sampah yang terus meningkat seiring dengan peningkatan populasi. Saat ini di India, jumlah landfill meningkat dan sistem manajemen tidak dapat secara efektif mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh *The Ministry of Environment, Forest and Climate Change* (MoEF&CC). Penelitian ini berfokus pada meninjau evolusi kebijakan pengelolaan sampah kota di India, terdapat tiga fase perubahan fokus pada kesehatan masyarakat dan sanitasi, keamanan lingkungan, dan (*municipal solid waste management*) MSWM dan perubahan iklim. Fase pertama melahirkan aksi besar terhadap pengelolaan sampah di India dengan didorong dari perspektif Kesehatan Masyarakat dan sanitasi yang mana pemerintah lebih berfokus pada pemberantasan penyakit menular penyakit karena merupakan penyebab utama morbiditas dan kematian di India. Fase kedua pada era 1980 hingga 2000 berfokus pada lingkungan dan pembangunan dengan menekankan pada pengurangan polusi. Kepedulian terhadap manajemen sampah di negara ini muncul pada pertengahan 1980-an setelah terjadinya tragedi Bhopal pada 3 Desember 1984. Tragedi ini pertama kali menarik perhatian pemerintah terhadap kerusakan lingkungan dan korban jiwa yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan limbah beracun. Setelah kejadian ini, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan memberlakukan undang-

undang Perlindungan Lingkungan pada 1986. Undang-undang ini mengatur limbah berbahaya (pengelolaan dan penanganan), 1989 diikuti dengan aturan penanganan limbah bio-medis, 1998 diciptakan untuk meminimalkan bahaya lingkungan dan kesehatan masyarakat. Fase ketiga di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memastikan keamanan lingkungan dalam pengelolaan limbah selama 1980-an dan 1990-an dengan tujuan untuk mencapai pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan mitigasi gas rumah kaca. Penulis juga menjelaskan faktor-faktor kesenjangan yang serius dalam kebijakan, strategi implementasi dan pemantauan kota-kota di India, (1) tidak ada sistem pengumpulan yang terpisah untuk sampah kota dan praktik pemilahan yang minimal adalah penyebab terbesar dari gunungan sampah yang besar di kota-kota, (2) data tentang pembuatan dan pemrosesan (*municipal solid waste*) MSW yang dibuat oleh berbagai instansi saling bertentangan sehingga menimbulkan pertanyaan tentang prosedur pengumpulan data itu sendiri. Lebih jelasnya tidak adanya pendataan yang sistematis dan berkala mengenai jumlah dan komposisi sampah sehingga menyebabkan pengelolaan sampah kota tidak efektif, (3) India masih mengadopsi landfills sebagai cara pembuangan sampah perkotaan yang paling umum dan pengomposan dilakukan dalam skala terbatas. Terkendala finansial yang tidak mempunyai fasilitas penanganan sampah kota sehingga kota-kota di India kekurangan kapasitas dan kapabilitas fasilitas yang memadai dan dampaknya membawa kegagalan pada pengimplementasiannya, (4) TPA di India masih mencoba untuk mengadopsi teknologi untuk menyelesaikan masalah pengelolaan sampah seperti negara-negara lain, namun pada kenyataannya TPA masih didominasi dengan tingkat adopsi teknologi yang sangat rendah. Dengan demikian, mengadopsi teknologi tidak pernah menyelesaikan masalah pengelolaan sampah karena kondisi lokal (sosial dan ekonomi), sumber daya dan kapasitas harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan. Di India, teknologi diadopsi dari negara-negara barat tanpa memahami kebutuhan dan kondisi. Ini terutama karena tidak ada perencanaan sebelum desain teknologi. Pada penelitian yang ditulis oleh Priti dan Kasutri Mandal ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu mengangkat tema yang sama yaitu terkait dengan pengelolaan sampah dan menyoroti tantangan yang dihadapi dan memberikan

saran tentang kebijakan dan praktik pengelolaan sampah kota. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu lebih berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Putat Nutug dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, sedangkan penelitian Priti lebih meninjau evolusi pengelolaan limbah padat perkotaan di India.

Penelitian keempat yang akan penulis bahas yaitu Linda Godfrey dan Suzan Oelofse Tahun 2017, berjudul **“Historical Review of Waste Management and Recycling in South Africa”** menjelaskan secara rinci tentang sejarah pengelolaan sampah di Afrika Selatan. Sering dikatakan bahwa Afrika Selatan tertinggal 20-30 tahun di belakang Eropa (dan negara-negara maju lainnya) dalam pengelolaan sampah dari penimbunan ke pencegahan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan. Penelitian ini akan menunjukkan, bahwa terlepas dari (atau karena) kelambatan ini, Eropa memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan dan undang-undang yang muncul di Afrika Selatan sejak akhir 1990-an. Sementara sebagian besar sampah yang dihasilkan di Afrika Selatan (90%) terus dikirim ke TPA untuk dibuang, keterlambatan dalam pembangunan ini memberikan kesempatan bagi Afrika Selatan untuk memahami dan mempelajari dari apa yang telah diterapkan oleh negara lain (kebijakan dan teknologi). Penelitian ini menyajikan sejarah singkat pengelolaan dan daur ulang sampah di Afrika Selatan sejak akhir 1980-an yang mana penulis mengidentifikasi empat tahap di mana sektor limbah dan daur ulang Afrika Selatan telah bertransisi selama tiga dekade terakhir. Yang pertama, disebut “Zaman Penimbunan”, adalah periode yang dimulai pada tahun 1989 dan dari mana, dapat dikatakan, Afrika Selatan belum muncul. Tahap kedua, adalah “Munculnya Daur Ulang” yang dimulai pada tahun 2001 dengan diterbitkannya Deklarasi Polokwane dan mengarah pada pelarangan kantong plastik sekali pakai. Tahap ketiga, adalah “Banjir Regulasi”, periode yang dimulai pada tahun 2008 dengan diundangkannya NEM: Undang-Undang Sampah (UU 59 Tahun 2008). Tahap keempat, “The Drive for EPR”, yang dimulai pada tahun 2012 dengan diterbitkannya Integrated Industry Waste Tire Management Plan (IIWTMP). IIWTMP, yang dikelola oleh Producer Responsibility Organisation, bertujuan untuk memenuhi tanggung jawab produsen ban atas limbah ban yang habis masa pakainya. Afrika Selatan memiliki

lingkungan kebijakan yang secara aktif mempromosikan pengalihan limbah dari TPA melalui pencegahan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan. Namun, respons terhadap kebijakan ini lambat, dengan hanya 10% dari semua limbah umum dan berbahaya yang dihasilkan pada tahun 2011 yang dialihkan dari TPA namun, penimbunan, seringkali untuk membuka tempat pembuangan sampah, tetap menjadi solusi teknologi yang dominan untuk mengelola sampah di Afrika Selatan. Melalui pendanaan dan keahlian teknis yang diberikan oleh lembaga donor internasional, negara-negara maju memiliki pengaruh yang nyata terhadap lanskap daur ulang dan limbah Afrika Selatan. Sementara Pemerintah telah mengidentifikasi EPR sebagai mekanisme untuk mendanai peningkatan daur ulang, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha di sektor kertas dan pengemasan, limbah elektronik, penerangan dan ban, mekanisme juga harus ditemukan untuk mendorong pemanfaatan aliran limbah lain di mana "produsen" mungkin tidak begitu jelas. Membuka peluang sosial, ekonomi dan lingkungan yang disediakan oleh sumber daya sekunder berpotensi menciptakan peluang yang signifikan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengangkat topic yang sama yaitu tentang pengelolaan sampah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian ini lebih memfokuskan pada sejarah pengelolaan sampah dan daur ulang sampah di Afrika Selatan sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Penelitian kelima yang akan penulis bahas yaitu Nachalida Yukalang, Beverley Dawn Clarke dan Kirstin Elizabeth Ross Tahun 2017, berjudul **“Solid waste management in Thailand: an overview and case study (Tha Khon Yang sub-district)”** menjelaskan akibat urbanisasi yang cepat, pengelolaan limbah telah menjadi masalah yang signifikan di beberapa negara berkembang termasuk Thailand. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat Thailand untuk mengelola masalah sampah tidak sepenuhnya dapat teratasi dengan benar. Penelitian ini menjelaskan pula rencana pengelolaan sampah kota di Thailand saat ini dan mengkaji pengelolaan sampah kota di tingkat lokal, dengan fokus pada sub-distrik Tha Khon Yang di sekitar Universitas Mahasarakham di Provinsi Mahasarakham. Dalam dua dekade, area ini telah diubah dari pedesaan menjadi

lanskap perkotaan yang menampilkan akomodasi untuk lebih dari 45.000 mahasiswa dan berbagai fasilitas bisnis. Perkembangan dan arus orang ini telah melampaui kemampuan pemerintah untuk mengelola sampah kota. Terdapat peluang yang signifikan untuk meningkatkan infrastruktur lokal dan kapasitas operasional namun ada beberapa mekanisme untuk menyediakan dan mendistribusikan informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Banyak proyek pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank daur ulang sampah, proyek 3R (reduce, reuse, dan recycle), dan proyek sampah menjadi biogas telah ditinggalkan. Selain itu, limbah dari Tha Kon Yang dan sekitarnya telah dipindahkan ke tempat pembuangan sampah yang tidak sehat. Selain itu, pembuangan sampah sembarangan dan pembakaran sampah yang tidak terkendali, yang memperburuk masalah polusi saat ini. Teknik penelitian yang digunakan penulis yakni menemukan literatur yang relevan di sejumlah database pencarian dan mengunggahnya ke sistem manajemen data Endnote untuk ekstraksi dan pengambilan yang mudah. Penulis menjelaskan bahwa rata-rata volume sampah di Thailand telah meningkat selama dekade terakhir di mana antara tahun 2008 dan 2015 jumlah sampah Thailand meningkat hampir 3 juta ton menjadi 26,85 juta ton per tahun atau 73.560 ton per hari. Pada tahun 2008 adalah 1,03 kg per orang per hari, yang kemudian meningkat menjadi 1,13 kg per orang per hari pada tahun 2015 namun, ada perbedaan tingkat timbulan sampah di lokasi geografis yang berbeda. Faktor-faktor termasuk gaya hidup, standar hidup dan kepadatan penduduk bervariasi yang memiliki pengaruh pada tingkat timbulan sampah. Di kota-kota besar dan kawasan pariwisata adalah 1,0-1,4 kg per orang per hari, 0,7-1,0 kg per orang per hari di wilayah kotamadya, dan 0,4-0,6 kg per orang per hari di wilayah organisasi administrasi kecamatan. Peningkatan dramatis dalam akumulasi sampah terjadi selama banjir di beberapa provinsi pada akhir tahun 2011. Kekurangan fasilitas pengolahan limbah padat dalam kondisi darurat mengganggu pengumpulan dan pembuangan sampah di daerah yang terkena bencana selama bencana ini. Apalagi, pada awal tahun 2015, jumlah akumulasi sampah di sekitar Thailand telah mencapai 30,4 juta ton. Pemerintah Thailand mulai memperhatikan pengelolaan sampah, dan diperlukannya tindakan cepat yang harus diambil untuk mengembangkan strategi

yang kuat untuk mengatasi masalah tersebut. Penyusunan agenda persampahan nasional merupakan langkah besar untuk mendukung setiap cabang pemerintahan mengikuti “peta jalan pembuangan sampah dan limbah B3”. Agenda ini dapat mengantarkan periode perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah di seluruh wilayah di Thailand di mana otonomi pemerintah daerah ditingkatkan dan ada kebebasan untuk menangani masalah lokal dan menyesuaikan rencana untuk memenuhi kebutuhan khusus. Tha Khon Yang sedang menghadapi masalah dengan pengelolaan sampah yang begitu besar sehingga tidak dapat terus diabaikan. Mengembangkan budaya masyarakat dan tanggung jawab pribadi serta membangun kapasitas warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah adalah salah satu masalah besar bagi Kotamadya Subdistrik Tha Khon Yang. Dalam situasi ini masukan dari berbagai disiplin ilmu diperlukan untuk merancang sistem pengelolaan sampah yang tepat. Kapasitas teknis yang lebih baik akan diperlukan serta kerangka kerja yang jelas untuk menangani pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, dan pemantauan sampah. Jika hal ini digabungkan dengan implementasi kebijakan yang transparan dan fokus yang berkelanjutan pada keterlibatan dan konsultasi masyarakat, akan ada hasil positif terkait pengelolaan sampah di sub-distrik Tha Khon Yang. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengangkat topic pengelolaan sampah namun yang membedakan yakni penelitian ini cakupannya Kecamatan sedangkan penelitian penulis cakupannya Desa atau Kelurahan.

Penelitian keenam yang akan penulis bahas yaitu Hyeong-Jin Choi, Yong Choi dan Seung-Whee Rhee Tahun 2019, berjudul **“A new concept of advanced management of hazardous waste in the Republic of Korea”** menjelaskan bahwa karakteristik limbah berbahaya harus dihilangkan atau distabilkan namun, sebagian besar pendaur ulang di perusahaan daur ulang tidak memahami cara menghilangkan karakteristik berbahaya dalam limbah dengan teknologi yang tepat. Tujuan dari bentuk baru pengelolaan limbah berbahaya tingkat lanjut adalah untuk menginformasikan pendaur ulang dan operator di industri tentang karakteristik berbahaya dan metode pengolahan yang diperlukan untuk semua proses pengelolaan, mulai dari timbulan limbah hingga pengolahan akhir. Dalam metode baru pengelolaan limbah berbahaya yang canggih, bahan kimia dalam

limbah harus diperiksa terlebih dahulu di sumber pembangkitan di setiap industri untuk membuat katalog bahan kimia kemudian, kategori metode pengolahan limbah untuk setiap karakteristik berbahaya dapat diperkenalkan untuk generator untuk mengolah limbah berbahaya dengan benar. Konsep baru sistem “InWhat” ini, yang mencakup semua proses pengelolaan di Korea, mulai dari timbulan limbah hingga pengolahan akhir, akan diusulkan sebagai alat dalam pengelolaan limbah berbahaya tingkat lanjut dan diterapkan pada sistem WRRM. Untuk mengusulkan bentuk baru pengelolaan limbah B3 tingkat lanjut, diusulkan lima prinsip. Konsep baru pengelolaan limbah berbahaya lanjutan diusulkan dengan memeriksa semua proses pengelolaan, mulai dari sumber timbulan limbah hingga pengolahan akhir, berdasarkan prinsip-prinsip ini. Untuk membangun pengelolaan limbah B3 yang canggih, dipertimbangkan jenis limbah, karakteristik limbah berbahaya, metode pengolahan berdasarkan karakteristik berbahaya dan pengelolaan informasi oleh pemangku kepentingan. Sistem Allbaro, yang mengumpulkan informasi tentang limbah berbahaya berdasarkan teknologi informasi, di bawah Undang-Undang Pengendalian Limbah, harus direvisi untuk menerapkan "sistem InWhat" dan untuk meningkatkan informasi yang tersedia tentang limbah berbahaya. Karena evaluasi "sistem InWhat", dikombinasikan dengan Sistem Allbaro, dilakukan sesuai dengan indikator kinerja utama, dapat diproyeksikan bahwa daur ulang limbah berbahaya akan diaktifkan dengan pengenalan "sistem InWhat" di Korea. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengangkat tentang pengelolaan sampah namun penelitian ini secara spesifik pengelolaan sampah berbahaya atau B3 di Korea Selatan sedangkan penelitian penulis tidak secara spesifik bentuk sampahnya dan berfokus pada kebijakan pengelolaan sampah.

Penelitian ketujuh yang akan penulis bahas yaitu Gusrini Yulistia, Margaretha Suryaningsih dan Dewi Rostyaningsih Tahun 2014, berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah”**. Hasil dari penelitian ini dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan



pemanfaatan kembali sampah dengan metode 3R dan bank sampah yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam penjelasan implementasi kebijakan dalam kegiatan pengelolaan sampah belum dilakukan secara optimal. Belum optimalnya kegiatan ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat Kota Semarang untuk ikut serta peduli tentang pengelolaan sampah. Hanya terdapat dua yakni daerah Jomlang dan Sampangan yang masyarakatnya sudah mau ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah implementasi kebijakan Peraturan Daerah dan membahas tentang persampahan, namun adanya perbedaan di dalamnya yakni penulisan penelitian ini menjelaskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah cakupan Kota, sedangkan penelitian penulis memfokuskan penelitian pada timbulan sampah dengan cakupan Desa atau Kelurahan.

Penelitian kedelapan yang penulis akan bahas yaitu jurnal yang ditulis oleh Andari Fithriya, Syahfrudin dan Mochtar Hadiwidodo, berjudul **“Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat (Studi Kasus: RW IV dan RW V Kelurahan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)”**, hasil dari penelitiannya yaitu timbulan sampah di Kelurahan Banyumanik tahun 2014 sebanyak 1,745 liter/orang/hari atau 0,385 kg/orang/hari, timbulan sampah ini sebagian besar berasal dari sampah rumah tangga. RW IV dan RW V dalam mengelola sampah masih dilakukan secara konvensional, seperti wadah sampah berupa kantong plastik, tong sampah plastik, dan keranjang bambu. Sampah yang telah terkumpul akan diangkut oleh 1 unit dump truck setiap 2-3 hari sekali. Pengelolaan sampah terpadu dimulai dari pewadahan dan pemilahan sampah secara mandiri oleh tiap rumah yang menjadi tiga jenis wadah terpilah berupa kantong plastik untuk sampah bahan kompos, sampah layak jual, dan sampah residu. Pada tahun 2014, tingkat pelayanan pengangkutan sampah Kelurahan Banyumanik hanya mencapai 34%. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Bangunharjo, namun pengelolaan sampah oleh KSM belum dikategorikan berjalan dengan baik. Penelitian ini juga menjelaskan adanya pembiayaan persampahan yakni bagi warga yang mengikuti memberikan iuran setiap bulannya untuk pembiayaan pengumpulan sampah. Iuran yang dikeluarkan warga setiap

bulannya sebesar Rp 5.000,- hingga Rp 20.000,-/ Kartu Keluarga (KK) yang diberikan kepada petugas kebersihan atau RT. Pembiayaan pengangkutan sampah, tiap-tiap RT dibebankan iuran sebesar Rp 100.000,- per bulan. Meskipun demikian, tidak semua warga ikut berlangganan memberikan uang iuran setiap bulannya, sehingga pengelolaan sampah terpadu dengan menerapkan konsep 3R diharapkan dapat dilakukan oleh seluruh warga baik yang ikut membayar iuran atau tidak. Konsep 3R di antaranya, melakukan pemilahan sampah sesuai dengan ketentuan, membayar iuran sampah wajib setiap bulan, menaati peraturan yang telah ditetapkan, memberikan masukan untuk pengembangan sistem, dan tidak lagi membuang sampah di kali atau membakar sampah pada lahan kosong. Dalam penelitian ini, menjelaskan belum optimalnya pengelolaan sampah secara terpadu melalui KSM dan membayar uang insentif perbulannya. Penelitian ini, mempunyai sedikit kesamaan terhadap penelitian penulis adalah keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengelola sampah. Perbedaan dalam penulisan penelitian ini adalah penjelasan yang memfokuskan pada KSM dan pembiayaan pengelolaan sampah, sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti memfokuskan pada kebijakan pengelolaan sampah.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Ryan Aditya Pratama, Kiki Prio Utomo dan Dian Rahayu Jati Tahun 2016, berjudul **“Perilaku Masyarakat Dalam Membuang Sampah Di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat membuang sampah belum dilakukan dengan benar. Dari hasil penelitian ini memberikan data bahwa banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan khususnya di Kelurahan Sungai Jawi Dalam. Di wilayah kelurahan ini telah disediakan TPS oleh Dinas Kebersihan, namun masih saja ada warga yang dengan sengaja membuang sampah diluar TPS. Sehingga tidak semua sampah yang di angkut oleh Dinas Kebersihan. Seringkali kita melihat sampah berserakan di sekitar TPS. Perilaku pembuangan sampah secara spontan ke luar TPS tersebut dibentuk oleh keyakinan warga yang menganggap bahwa sampah yang dibuang ke luar TPS akan dibersihkan oleh petugas kebersihan. Faktor lain yang membentuk perilaku warga untuk membuang sampah secara spontan keluar TPS adalah banyaknya timbulan sampah yang telah

terlanjur tersebar di luar TPS. Kondisi ini memberikan motivasi kepada individu untuk membuang sampah karena secara psikologis dengan adanya sampah yang telah tersebar di sekitar individu akan memperkecil halangan kepada individu untuk tidak membuang sampah disekitar tempat tersebut, karena secara afektif akan akan muncul pendapat bahwa lingkungan sekitar individu juga telah kotor oleh sampah yang bukan saja di hasilkan oleh dirinya. Diperlukannya pengawasan dan monitoring dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Pontianak mengenai pembuangan sampah. Selain pengawasan, juga dibutuhkannya sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berkomitmen untuk bersama-sama melakukan pengelolaan sampah dengan baik serta meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah yang tidak hanya berdasarkan keluhan yang diterima tetapi juga lebih aktif dalam mengawasi setiap wilayah yang ada termasuk wilayah pinggiran, guna mengurangi pembuangan sampah liar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah membahas tentang persampahan, namun yang membedakan yakni penulisan penelitian ini menjelaskan implementasi kebijakan pengelolaan sampah cakupan Kota, sedangkan penelitian penulis memfokuskan penelitian pada timbulan sampah dengan cakupan Desa atau Kelurahan.

Penelitian kesepuluh yang akan penulis bahas yakni jurnal yang ditulis oleh Nurjanah Tahun 2020, berjudul **“Efektivitas Kelembagaan TPPAS Regional Dalam Pengelolaan Sampah di Bandung Raya”**, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Jawa Barat adalah fasilitas umum yang dibangun guna kepentingan bersama. TPPAS yang digunakan di Bandung Raya yaitu TPPAS Sarimukti (bagian barat) dan TPPAS Legok Nangka (bagian timur). TPPAS Regional Jawa Barat diawasi oleh UPTD Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat. BPSR Jawa Barat memiliki tupoksi yaitu melaksanakan fungsi Dinas di Bidang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Barat. Peneliti dalam penelitian ini menjelaskan BPSR sudah melakukan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan sampah di TPPAS Regional, salah satunya di TPPAS Regional Sarimukti, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik, pertama koordinasi antar badan pengelola regional dengan

kabupaten/kota di wilayah Bandung Raya. Koordinasi ini meliputi pengangkutan sampah, pemrosesan sampah dan pengolahan sampah. Koordinasi yang kurang baik ini ditandai dengan sampah-sampah yang menumpuk dan tidak diangkut serta tidak ditangani dengan baik di tempat-tempat penampungan sementara (TPS) di kabupaten/kota di Bandung Raya. Pengelolaan sampah secara regional tidak bisa jika mengandalkan pengelolaan di tempat pemrosesan akhir sampah saja tetapi juga diiringi dengan pelaksanaan 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) oleh masyarakat sehingga dapat mengurangi sampah yang diangkut ke TPPAS Regional. Pada penelitian ini, pengelolaan sampah di Bandung Raya melalui Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) Jawa Barat sebagai lembaga Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) belum dilaksanakan dengan baik. Kurangnya koordinasi menjadi faktor utama yang dijelaskan oleh peneliti. Penulisan penelitian ini sudah sangat baik, dan ditulis secara berurut sehingga mudah untuk dipahami.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- a. Menjelaskan bagaimana mengoptimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor agar dapat berjalan dengan optimal.
- b. Menjelaskan upaya untuk menanggulangi permasalahan sampah yang terjadi di Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.

## **1.4 Manfaat Penelitian (Akademis, Praktis)**

Penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, maka manfaat yang diharapkan oleh penulis adalah:

#### 1.4 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kebijakan publik. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam.

#### 2.4 Manfaat Praktis

Diharapkan dengan ini dapat memberikan motivasi dan strategi ketika suatu kebijakan publik dapat berjalan dengan baik dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada organisasi pemerintahan mengenai keberlangsungan kebijakan publik yang dapat bertahan lebih lama.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan diperlukan agar pembahasan dalam tulisan skripsi ini dapat dengan mudah untuk dilihat dan dipahami secara menyeluruh, maka diperlukannya sistematika dan pedoman dalam penulisan skripsi, berikut penjelasannya:

## BAB I

## PENDAHULUAN

Bab satu yakni berisikan pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah dalam kebijakan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Perda Kabupaten Bogor No 2 Tahun 2014, kemudian tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari penelitian skripsi, kemudian manfaat penelitian yang dapat diambil setelah melakukan penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II**

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab dua yakni berisikan kajian teori dan konsep, menjelaskan tentang teori yang akan digunakan yaitu teori kebijakan publik dan teori implementasi kebijakan publik Konsep yang akan digunakan yaitu konsep pengelolaan sampah.

## **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Bab tiga yakni berisikan metodo penelitian, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, keabsahan data dan tabel rencana waktu.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

## **HASIL PENELITIAN DAN**

Bab ini akan menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dalam menanggulangi masalah sampah yang terjadi di Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

Bab ini membahas mengenai pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi judul buku, jurnal dan dokumen-dokumen penelitian lainnya yang dilengkapi tahun terbit, nama pengarang dan informasi seputar berbagai sumber yang digunakan.

## **LAMPIRAN**

Berisi data-data pendukung untuk penelitian ini.